

**Peran Pemerintah Desa Sumber Brantas
Dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Studi Pada Kelompok Tani Desa Sumber Brantas)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



OLEH :

**MARIA NOVIANA KAKA
NIM. 2019210068**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji-Kota Batu, serta sejauh mana pemerintah mendukung pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Prosedur yang digunakan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, verifikasi, dan konfirmasi temuan.

Pemerintah harus berperan sebagai penyelenggara, pengawas, dan sumber informasi; mereka juga harus memberikan layanan penyuluhan, membangun infrastruktur dan fasilitas, dan membentuk kelompok tani. Kesimpulan tersebut peneliti peroleh berdasarkan hasil analisis data, pembahasan penelitian, dan penjelasan. Inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pertanian Desa Sumber Brantas bukan satu-satunya faktor keberhasilan usaha tersebut. Aspek yang memberikan dukungan antara lain hubungan yang kuat antara pemerintah dan petani serta kepemimpinan kepala desa. Namun demikian, terdapat hambatan seperti rendahnya tingkat keterampilan petani, rendahnya semangat dan komitmen petani, kurangnya fasilitas atau peralatan, dan terbatasnya keuangan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Desa Sumber Brantas, Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan merupakan ketentuan yang menjadi pedoman untuk mencapai konsensus di antara seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan dapat dilihat sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan otorisasi dalam melaksanakan mandatnya. Salah satu cara untuk mengevaluasi pencapaian suatu kebijakan adalah melalui proses penerapannya.

Perdesaan merupakan wilayah yang memerlukan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi daerah. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa pun terbit. Desa adalah desa, baik disebut desa adat atau dengan nama lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1.

Desa didefinisikan sebagai organisasi masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas yang jelas, seperti yang akan kita bahas nanti. mempunyai kewenangan mengurus dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan serta hak-hak masyarakat adat dan/atau hak adat yang dilindungi oleh struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2019 meliputi tugas dan fungsi kepala desa.

Sebagai bagian dari mandatnya sebagai lembaga pemerintah yang melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan berbagai layanan publik. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 yang mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pada Pasal 1 Ayat 1 undang-undang tersebut memberikan masyarakat desa kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri sesuai standar yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan potensi dan potensi yang dimilikinya. potensi. keragaman di antara struktur regional. Langi (2015) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan.

Konsep otonomi desa menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa memperoleh kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu undang-undang desa diperlukan untuk membentuk kewenangan daerah. Pemerintahan desa saat ini berjalan sebagai suatu komunitas yang menggabungkan pemerintahan daerah (*local self governance*) dan pemerintahan mandiri (*self governance*), bukan berstatus sebagai badan pemerintahan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state Government*).

Desa mempunyai tugas yang lebih luas dan kedudukan yang lebih otonom dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri (Ra'is, 2018). Sektor pertanian sangat penting bagi kesehatan perekonomian Indonesia karena menghasilkan pangan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, pertanian secara langsung berkontribusi terhadap penggunaan sumber daya mentah industri, sehingga menurunkan kemiskinan dan menjaga lingkungan.

Laju pertumbuhan ekonomi peradaban yang semakin cepat menjadikannya lebih memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang ada saat ini, masyarakat pedesaan—terutama

mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sama sekali—akan mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Kelompok tani merupakan suatu inovasi yang cocok atau dapat diterima oleh masyarakat Desa Sumber Brantas, khususnya bagi mereka yang potensi utamanya terletak pada usaha pertanian. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman, kelompok tani dapat tumbuh dan berkembang dengan memberdayakan petani untuk mengubah cara pandangnya guna meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuan kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Guna menumbuhkan pertumbuhan dan kekompakan kelompok tani.

Meskipun banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi, organisasi petani juga menjadi faktor utama keberhasilan sektor pertanian. Sebagai konsekuensinya, pemerintahan Desa Sumber Brantas secara signifikan meningkatkan ketahanan pangan kelompok tani dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Rencana pemberdayaan pemerintah desa yang difokuskan pada kelompok tani menanyakan bagaimana cara meningkatkan standar sumber daya manusia, memperluas potensi Desa Sumber Brantas, dan melindungi kelompok tani dengan mengubah dan mendorong perilaku masyarakat agar mereka dapat mewujudkan potensi mereka secara maksimal.

Pemain yang merupakan karakter utama dalam skenario ini menuntut kekuasaan yang lebih besar dari pemerintah desa. Komunitas petani harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan atau pengembangan berbagai program pemberdayaan. Petani perlu segera terkena dampak pemberdayaan masyarakat agar dapat memperluas kemampuan mereka saat ini. Selain itu, hal ini

juga harus dilakukan secara terencana dan fokus pada kepentingan masyarakat, baik program individu maupun kelompok.

Mengingat mayoritas penduduk Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah mayoritas penduduknya adalah petani, maka peluang untuk memperoleh kekayaan alam sangat besar. Kelompok tani cukup aktif memunculkan ide-ide untuk memajukan komunitasnya; Jika pemerintah menyadari hal ini, maka kegiatan kelompok tani bisa berkembang. Aset pertanian yang dikelola tentunya dapat membantu masyarakat dan organisasi pertanian lainnya.

Dapat kita simpulkan bahwa, seperti yang diharapkan, kelompok tani di Desa Sumber Brantas telah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Lembaga desa memastikan bahwa kelompok petani dilibatkan dalam pengembangan dan administrasi masyarakat sambil tetap mempertahankan kendali atas sumber daya yang signifikan. Pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dengan para pemimpin desa mungkin akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun temuan penulis menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya di lapangan masih belum sesuai dengan hasil yang diharapkan dari keterlibatan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kenyataannya, upaya pemerintah dalam mendukung organisasi petani di Desa Sumber Brantas justru menimbulkan banyak persoalan.

Sejauh mana pemerintah terlibat dalam pembuatan undang-undang untuk mendukung kesejahteraan petani menunjukkan betapa terbatasnya peran pemerintah dalam bidang ini. Petani masih kurang mendapat informasi dari regulator, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Peran pemerintah yang dinamis merupakan salah satu tujuan Desa Sumber Brantas yang belum tercapai. Kenyataannya, pemerintah belum melakukan seluruh upayanya untuk membantu masyarakat, baik dengan cara turun ke masyarakat dan memberikan berbagai pengetahuan dalam menyosialisasikan permasalahan atau solusi bagi komunitas petani, atau dengan memberikan bimbingan dan pelatihan langsung dalam pengelolaan pertanian.

Komunitas pertanian sangat membutuhkan program pelatihan yang disponsori pemerintah untuk membantu mereka melewati hambatan dan hambatan, namun pemerintah belum mampu melaksanakan program ini dengan baik. Selain itu, pemerintah juga masih belum menurunkan masyarakatnya ke lapangan untuk memantau kondisi guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pertanian itu sendiri.

Melalui organisasi petani di Desa Sumber Brantas, pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat karena berperan sebagai penyalur sarana yang cocok untuk petani. Namun, berdasarkan fakta sebenarnya, meskipun fasilitas yang disediakan pemerintah telah menjangkau masyarakat pertanian, namun fasilitas tersebut belum diterima atau digunakan oleh mereka karena belum diketahuinya hambatan teknologi dalam penggunaan dan eksploitasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan sebelum penelitian, tampaknya peran pemerintah sebagai fasilitator belum memenuhi tuntutan masyarakat. Pada musim ketika lahan pertanian sedang diolah, sangat sulit bagi individu untuk menerima pupuk; selain itu, mungkin sulit untuk mendapatkan pupuk yang disediakan pemerintah. Kesenjangan antara jumlah petani yang

mempunyai pupuk dan ketersediaannya juga mengakibatkan kelangkaan benih bagi masyarakat. Selain itu, peralatan pertanian pemerintah yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat tidak ada atau tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok tani adalah besarnya peran penyuluh pertanian lapangan (PPL), yang bertanggung jawab mengawasi dan mendukung petani dalam berbagai kapasitas, termasuk penyuluhan, pelatihan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. PPL dipekerjakan oleh penyuluh pertanian dan pemerintah desa. Program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Desa Sumber Brantas melalui pengembangan keterampilan, pemberdayaan, dan budidaya petani, masih jauh dari mewujudkan impian kesejahteraan. tingkat kehidupan.

Melihat kondisi yang dihadapi para petani di Desa Sumber Brantas, kekhawatiran tersebut semakin populer hingga seringkali diperdebatkan bahkan diangkat ke masyarakat umum, khususnya di kalangan petani di Desa Sumber Brantas. Akibatnya, komunitas pertanian kini berjuang melawan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini.

Karena permasalahan di atas membatasi kapasitas pemerintah dalam memberdayakan petani, maka penulis tertarik untuk mengkajinya. Masalah-masalah ini sedang berlangsung dan merupakan akibat dari keadaan yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, peneliti fokus melakukan penelitian dengan judul; “Peran Pemerintah Desa

Sumber Brantas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Desa Sumber Brantas”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan memperhatikan sejarah yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana kontribusi pemerintah Desa Sumber Brantas dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Di Desa Sumber Brantas, apa saja variabel yang memudahkan dan menghambat kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Mengetahui bagaimana kontribusi Pemerintah Desa Sumber Brantas terhadap upaya organisasi petani dalam pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang memudahkan atau menghambat upaya pemerintah Desa Sumber Brantas dalam memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani.

1.4 Manfaat Penelitian

Pengaruh tercapainya tujuan penelitian menentukan manfaat atau kegunaan penelitian, oleh karena itu berikut beberapa contoh manfaat temuan penelitian:

1. Secara Teoritis

Keuntungan-keuntungan berikut diharapkan dari penelitian ini, secara teoritis:

- a. Memberikan saran bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu administrasi publik ke depan.

- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan yang akan meramaikan karya sastra dan menjadi katalisator penyelidikan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas pemahaman penulis dan pengetahuan langsung mengenai efektivitas peran pemerintah Desa Sumber Brantas dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui kelompok tani di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- b. Dapat menjadi saran, masukan, dan informasi untuk dikaji bagi organisasi terkait yang penulis tunjuk sebagai subjek penyelidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, T. Sulistiyani. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Grahan Ilmu.
- Anwas. 2014. *Pembudayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung Alfabeta.
- Laelatul Hasanah dkk., *Statistika Ketenagakerjaan Sektor Pertanian tahun 2017-2018, Pusat data dan Sistem informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian*
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mardikanto, T & Soebianto, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosher. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yaguna
- Muhadam, Labolo. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ndraha, Taqliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rachmawati, Ike Kusdayah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rosidin, U. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rukminto, A.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelgensia Media.
- Shadu Wasistiono, M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek pengembangan Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta: Fokus Media
- Sugiyono. 2018. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wirutomo, Paulus. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*. Jakarta: PT. Raja Geravindo Persada.
- Zubaedi. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.